

***INDONESIA EXTRATERRITORIAL JURISDICTION OVER MISUSED
PERSONAL DATA IN COMPARISON TO THE EUROPEAN UNION***

Author:

Muchammad Ghifari Al Kanz¹ and Devita Kartika Putri²

ABSTRACT

Until now, Indonesia still not yet enforce the Personal Data Protection bill. With the non-existence of the main law that regulates personal data protection, specifically on its extraterritorial jurisdiction on its criminal sanctions, it will become a threat towards its citizens over personal data misuse that is located outside Indonesia territory. On the other hand, other states has enforced various personal data protection to its national laws, EU for instance, with its GDPR that regulates data protection very comprehensive and can be considered as one of the leading regulations in regards to data protection, especially its extraterritorial jurisdiction. This Legal Research employs statutory and comparative legal research method that refers to normative framework. It predominantly relies on laws and regulations along with literature studies to render analysis on the issues.

Keywords: *GDPR, UU ITE, Data Protection, Extraterritorial Jurisdiction*

¹ Student of the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2016).

² Lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

***YURISDIKSI EKSTRATERRITORIAL INDONESIA PADA
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PERBANDINGAN
DENGAN UNI EROPA***

Oleh:

Muchammad Ghifari Al Kanz³ and Devita Kartika Putri⁴

INTISARI

Hingga saat ini, Indonesia masih belum memberlakukan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dengan tidak adanya undang-undang utama yang mengatur perlindungan data pribadi, khususnya pada yurisdiksi ekstrateritorial mengenai sanksi pidana, akan menjadi ancaman bagi warga negaranya atas penyalahgunaan data pribadi yang terletak di luar wilayah Indonesia. Di sisi lain, negara-negara lain telah memberlakukan berbagai perlindungan data pribadi pada undang-undang nasionalnya, seperti UE misalnya, dengan peraturan GDPR yang mengatur perlindungan data yang sangat komprehensif dan dapat dianggap sebagai salah satu, terutama yurisdiksi ekstrateritorial. Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian hukum dan perbandingan hukum yang mengacu pada kerangka kerja normatif. Ini terutama bergantung pada hukum dan peraturan bersama dengan studi literatur untuk membuat analisis tentang masalah tersebut.

Kata kunci: *GDPR, UU ITE, Perlindungan Data, Yurisdiksi Ekstrateritorial*

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

⁴ Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.